



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN
DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BEKASI.**

T E S I S

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Derajat S2

Program Magister Kenotariatan

Oleh :

MARGARETHA EVELINE, SH

B4B 007 130

PEMBIMBING I :

Mulyadi, SH, M.S

PEMBIMBING II :

Yunanto, SH. M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN
DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BEKASI.**

Disusun Oleh :

MARGARETHA EVELINE, SH

B4B 007 130

**Dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 25 April 2009**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing I

**Mulyadi, SH, M.S
NIP. 130 529 429**

Pembimbing II

**Yunanto, SH, M.Hum
NIP. 131 689 627**

**Mengetahui,
Ketua Program Magister
Kenotariatan UNDIP**

**H.Kashadi, SH, M.H
NIP. 131 124 438**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Nama :

MARGARETHA EVELINE, SH , dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut

1. Tesis ini adalah ***hasil karya saya sendiri*** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun.

Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;

2. ***Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro Semarang, dengan sarana apapun, baik seluruh atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 25 April 2009

Yang Menyatakan,

MARGARETHA EVELINE, SH

Abstrak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BEKASI.

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti karena perkawinan orang tuanya, hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, Walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuannya.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Disamping itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum, tidak ada catatan, tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir, dari perkawinan yang tidak dicatatkan, memperoleh kedudukan seperti anak sah, adalah dengan mengajukan permohonan penetapan dari pengadilan agama setempat, atau pengadilan negeri setempat, yang disesuaikan dengan kantor pencatatan kelahiran anak masing-masing agama.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan apabila perkawinannya hanya dilakukan menurut agama saja, dan tidak dicatatkan dikantor catatan sipil, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya bisa diakui dengan cara pengesahan anak, sehingga anak tersebut menjadi anak sah. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tuanya mencatatkan perkawinannya dikantor catatan sipil terlebih dahulu.

Penelitian yang dilaksanakan adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran tersebut, ada dua pola berpikir, yaitu secara empiris, atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberi kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Kata kunci : Perlindungan hukum,
Anak luar kawin

ABSTRACT

Protection Of Law To Borne Child Of Marriage Which Not Registered Attributed to Code Law Number 1 Year 1974 Connubial And Code Law Number 23 Year 2002 about Protection Of Child In Bekasi.

Its legal consequences if marriage not registered, borne child status of the marriage will become not surely, because marriage both of its parents only validity religiously. Another word is, although the child is valid child, but don't have able to strengthen that the child is validity from both its parents.

Domiciling borne child from a marriage which not registered only owning civil link with its mother whereas with its father don't have contractual terms except existence of confession of its father to the child which must be conducted with authentically certificate. Beside that borne child of marriage which do not yet to be registered will have difficulty to acquire birth certificate, Without existence of birth certificate to child, hence state have resistance in protecting child, because judicially there no note about birth of child status along with data's both of parent causing child birth.

Legal effort able to be done so that a child who was born from marriage which not registered to obtain domicile as officially child, is by apply stipulating of Justice of local Religion, and local district court, which appropriated with office record-keeping of child birth of each religion. Effort whereas way or means able to be conducted if its marriage only done according to just religion and not registered in civil office, hence child which born from the marriage only can confess by authentication of child, so that the child become officially child. Authentication of child can only be conducted if its parents pre-fabricated register its marriage in Office Note Civil.

Executed research is to get data which have been tested by erudite truth of it. But to reach the truth there is two way of thinking that is empirically or through experience. Therefore to find erudite method, hence [in] joining rational approach method and method approach of empiric, here rationalism give logical idea framework is give verification framework or examination to ascertain a truth.

Keyword : Protection by the law,
A Child being born outside the marriage

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT serta salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan tesis ini dengan Judul

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bekasi.

Penulis hendak mengetahui segala permasalahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kota Bekasi. selanjutnya penulis hendak mengkaji secara yuridis lebih mendalam ke dalam suatu karya ilmiah ini.

Selain itu, penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan pada Program

Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini :

1. Bapak Prof. Dr. dr. SUSILO WIBOWO, MS, Med, Spd, And, Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. KASHADI, SH, MH, Ketua program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak MULYADI, SH, MS, Mantan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak YUNANTO, SH, M.Hum, Dosen pembimbing yang dengan sabar sudi memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Anggota tim review proposal dan tim penguji tesis, yang telah banyak meluangkan waktunya guna menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Ibu Yeyet Nurhayati SH, Dinas Pencatatan Kantor Catatan Sipil Bekasi, Ibu Suharmini, SH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Bapak Mansyur Syah, SH, Wakil Penitera Pengadilan Agama Bekasi,

Lembaga Perlindungan Anak Bekasi, Bapak Arist Merdeka Sirait,
Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Anak).

7. Orang tuaku dan adik-adiku, atas segala bantuan dan do'anya.
8. Suami, dan anak-anaku, atas segala dukungannya
9. Rekan-rekan MKn Undip angkatan 2007, terima kasih atas persahabatan dan persaudaraannya.
10. Rekan-rekan warung Rejeki, Arpa dan parlan. Dan anak-anak Tegal Sari
11. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan.

Mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan sumbangsih pada masyarakat sebagai ilmu pengetahuan. Jika dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan serta ketidaksempurnaan, maka hal tersebut bukan merupakan kesengajaan, melainkan karena kekhilafan penulis, karenanya kepada siapapun yang membaca tesis ini penulis mohon agar memaklumi dan memberikan kritik yang dapat membangun.

Semarang, 25 April 2009

Penulis

MARGARETHA EVELINE, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
.....	iv
PERNYATAAN	vii
.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
.....	
ABSTRAKSI	1
.....	8
ABSTRACT	9
.....	9
DAFTAR ISI	10
.....	14
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1. Latar Belakang	15
.....	15
1.2. Perumusan Masalah	16
..... 1.3.	17
Tujuan Penelitian	17
.....	

1.4. Manfaat Penelitian	
.....	
1.5. Kerangka Pemikiran	
.....	
1.6. Metode Penelitian	
.....	
1.6.1. Metode Pendekatan	
.....	
1.6.2. Spesifikasi Penelitian	
.....	
1.6.3. Penelitian Kepustakaan.....	
.....	
1.7. Teknik Pengumpulan Data	
.....	
1.8. Metode Analisis Data	
..... 1.9.	
Sistematika Penulisan.....	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Perkawinan Di Indonesia	19
2.1.1. Pengertian Perkawinan	19
2.2. Asas-Asas Perkawinan.....	21
	24
	26

2.3. Syarat Sah Perkawinan	
2.4. Syarat-Syarat Perkawinan	
2.5. Pencatat Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	
2.5.1. Prosedur Perkawinan	
2.5.2. Akta Perkawinan Sebagai Alat Bukti	
2.6. Akibat Hukum Dari Sahnya Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	
2.7. Perjanjian Kawin	
2.8. Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan	
2.8.1. Pengertian Anak	
2.8.2. Kedudukan Anak	
2.8.3. Hak-Hak Anak Dalam Peraturan Perundang- Undangan	
Yang Berlaku	
.....	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Anak Dihubungkan Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang	
--	--

Perlindungan		
Anak.....	64	69
3.1.1. Faktor Penyebab Suatu Perkawinan Tidak Dicatatkan		
3.1.2. Pengakuan Adanya Pencatat Perkawinan		
	76	
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dhubungan Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak		
	78	

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan		
.....	102	4.2.
Saran.....		
	103	
Daftar Pustaka		
Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tersebut mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat, spiritual dan materil, fisik dan non fisik, dunia dan akhirat. Pembangunan tersebut mencakup pembinaan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami isteri yang didasari niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam lingkungan keluarga bahagia ini seorang anak manusia dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara.¹

¹ Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun, Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Depertemen Agama R.I, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Bangsa Indonesia telah lama mempunyai keinginan untuk memiliki peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional, dalam arti berlaku untuk seluruh golongan masyarakat bangsa Indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Keinginan unifikasi peraturan perkawinan diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia secara menyeluruh.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan

administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.²

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja yang melakukan perkawinan secara Islam maka perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut agamanya, maka perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh Pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan, yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Begitu pula dengan adanya kehadiran seorang anak yang lahir dari perkawinan sah kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya.

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak

² Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 110-112.

mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Undang-undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak.

Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin didalam hukum ternyata adalah inferior (lebih jelek atau rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian. Hak bagian anak

sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.³

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. Disamping itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Maka jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting ini dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri

³ J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110.

dan status kewarga negaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran itu sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, berupa memberikan hak-hak si anak. Dalam hal ini bagi anak yang masih mempunyai orang tua maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua juga merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut didalam hukum, bahkan adakalanya seorang anak sebelum ia dilahirkan telah diberikan hak dan kewajiban. Ketentuan hak-hak itu diatur secara tersebar dalam bentuk Perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan, seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar. Tidak seorangpun dapat merampas hak anak itu.

Hak dan kewajiban anak tersebut selain diatur dalam hukum nasional juga dalam hukum internasional. Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989, antara lain menyatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan hak yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Memiliki kewarganegaraan sejak lahir, mendapat jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum baik terhadap segala bentuk penyalahgunaan, kejahatan dan perbuatan-perbuatan diskriminasi. Konvensi tentang hak-hak anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga Indonesia telah terikat melaksanakan Konvensi tersebut.⁴

Dengan diaturnya hak anak baik dalam konvensi hak anak maupun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi seharusnya tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan karena dengan perbedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.

⁴ Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Penerbit Alumni, 1991, hlm. 154.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa ;

“ Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya “

Pada Pasal 27 ayat (2) menegaskan, bahwa setiap identitas anak yang dilahirkan harus dituangkan dalam bentuk akta kelahiran.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BEKASI “.

Penulis akan mengambil permasalahan yang menitik beratkan khusus pada hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak .

1.2. Perumusan Masalah

Pada penelitian ini, penulis, berusaha untuk membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap anak dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam mendapatkan hak-haknya dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan meneliti akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap anak dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui, memahami dan meneliti pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan serta perlindungan anak pada khususnya.

2. Secara Praktis :

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang melaksanakan perkawinan yang tidak dicatatkan dan akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami isteri yang didasari niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam lingkungan keluarga bahagia ini seorang anak manusia dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi

manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh Pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan, yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Begitu pula dengan adanya kehadiran seorang anak yang lahir dari perkawinan sah kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya.

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena

perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. Disamping itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Maka jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah

melangsungkan perkawinan. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, berupa memberikan hak-hak si anak. Dalam hal ini bagi anak yang masih mempunyai orang tua maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tuanya.

Berdasarkan latarbelakang pemikiran tersebut diatas. maka seorang anak sebelum ia dilahirkan telah diberikan hak dan kewajiban. Ketentuan hak-hak itu diatur secara tersebar dalam bentuk Perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan, seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar. Tidak seorangpun dapat merampas hak anak itu.

Dalam tesis ini peneliti menitik beratkan kepada hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan serta perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan memperoleh kedudukan sebagai anak sah, adalah dengan mengajukan permohonan surat penetapan dari Pengadilan Agama setempat, dan pengadilan negeri setempat, yang disesuaikan dengan kantor pencatatan kelahiran anak masing-masing agama. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan apabila perkawinannya hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di kantor sipil, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya bisa diakui dengan cara pengesahan anak, sehingga anak tersebut menjadi anak sah. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tuanya mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil terlebih dahulu.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang timbul.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran tersebut ada dua buah pola berpikir yaitu secara empiris atau melalui

pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka di gabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberi kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁵

1.6.1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek.

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang timbul.

1.6.3. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data yaitu berupa :

- 1). Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari Undang-undang Dasar 1945 hingga ketentuan hukum yang bersifat teknis

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 36.

tentang perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tentang anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.3.2. Penelitian Lapangan (field research).

Dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara terarah, pada lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan, antara lain : Ibu Yeyet Nurhayati S.H., Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Ganti Nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Bekasi, Ibu Suharmini S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Bapak Mansyur Syah S.H., Wakil Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Lembaga Perlindungan Anak, Bapak Arist Merdeka Sirait, Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Anak).

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder mengenai objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh keterangan secara langsung dari instansi yang berhubungan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

1.8. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas pengaturan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan peraturan tentang perkawinan dan perlindungan anak berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun sekunder, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang di bagi dalam empat bab. Pembagian tesis ini menjadi beberapa bab dan sub bab, agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, Metode Penelitian, serta Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penganalisaan permasalahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan yang dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

BAB IV. PENUTUP

Bagian ini merupakan bab penutup yaitu yang berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Perkawinan di Indonesia

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup, hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat baik terhadap kedua pihak maupun terhadap keturunannya serta masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama ini. Seperti syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama itu.

Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang perkawinan tersebut, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli dan para sarjana seperti dikutip dibawah ini :

1. Hilman Hadikusuma, mengemukakan,

“Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan

perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing”.⁶

2. HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut :

“Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam”.⁷

Dari pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa pada umumnya pengertian perkawinan itu selalu dihubungkan dengan agama.

Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu, yakni mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.⁸

Sementara itu Undang-undang Perkawinan juga memberikan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat-Hukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju, 1990, hlm. 8 dan 10.

⁷ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1976, hlm. 1.

⁸ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, 1998, hlm. 6.

Pengertian perkawinan yang telah disebutkan sangatlah berbeda dengan pengertian menurut *burgelijke wetboek* yang memisahkan hukum perkawinan dengan ketentuan agama. Pasal 26 BW mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang hanya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan artinya pasal ini hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.⁹

2.2. Asas-Asas Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.¹⁰

Prinsip monogami ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

⁹R. Subekti, *Op-cit* hlm. 25.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 265.

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Begitu pula berdasarkan ketentuan dalam ayat 3 Surat An-Nissa', maka hukum Islam yang membolehkan poligami, ternyata menganut asas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat terakhir dari ayat 3 Surat An-Nisaa' tersebut, yang menyatakan : “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Dari ayat ini jelas, bahwa Allah SWT menganjurkan kita untuk beristri hanya seorang saja, karena apabila beristri lebih dari seorang dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil.¹¹

Sementara itu perkawinan poligami diperbolehkan dalam hal-hal tertentu sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

¹¹ *Ibid*, hlm 266.

Begitu juga apa yang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara itu mengenai pengecualian poligami lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- (2) Persetujuan yang di maksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-

sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

2.3. Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan yang diatur oleh negara berarti harus memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif suatu negara. Pada umumnya cara untuk mendapatkan pengakuan ini berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 telah diberlakukan Undang-undang Perkawinan sebagai hukum positif yang bersifat nasional dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Hazairin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-undang Perkawinan pertama-tama adalah hukum agama

masing-masing pemeluknya.¹² Oleh karena itu pengesahan perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan terlebih dahulu baru kemudian dicatat, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak perkawinan itu sendiri tidak dapat dicatatkan di kantor perkawinan, dengan perkataan lain, juga bukan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.¹³

Selanjutnya untuk menegaskan kembali bahwa yang menentukan sah atau tidak suatu perkawinan adalah hukum agama masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan maka dikeluarkanlah surat Menteri Dalam Negeri (mendagri) 17 April 1989 kepada gubernur diseluruh Indonesia tentang catatan sipil. Surat ini dikeluarkan untuk menegaskan kembali proses pelaksanaan perkawinan yang telah ditetapkan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan pelaksana Nomr 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam surat ini ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan di kantor

¹² Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974*, Jakarta, Tinta Mas, 1975, hlm. 56.

¹³ Wila Chandrawita Supriadi, *Agama dan Kepercayaan*, Projustitia 3 Juli 1997, hlm. 98.

catatan sipil pada hakekatnya dilakukan setelah pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan suatu agama.¹⁴

Dalam praktik sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama dan kepercayaannya itu, kalau suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara sehingga mengakibatkan hak isteri dan anak terlanggar. Jadi menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan sah apabila Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dipenuhi dan kemudian dicatat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan

Mengenai sahnya perkawinan ditafsirkan berbeda beda oleh para ahli hukum Djoko Prakoso dalam bukunya menyatakan dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan.¹⁵

2.4. Syarat-Syarat Perkawinan

Di Indonesia bagi yang ingin melangsungkan perkawinan harus melalui beberapa prosedur yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, di bawah ini akan dibahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam hal melangsungkan perkawinan.

¹⁴ Surat Edaran Mendagri 1989.

¹⁵ Djoko Prakoso, **Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia**, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 20.

Syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12

Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam yakni harus memenuhi rukun dan syarat nikah, maksud dari syarat ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan adalah:

- a. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
- b. Dewasa.

- c. Kesamaan agama Islam.
- d. Tidak dalam hubungan nasab.
- e. Tidak ada hubungan (rodhoah)
- f. Tidak semenda (mushoharoh)

Rukun perkawinan bagi masyarakat Islam merupakan segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan, maksudnya apabila syarat-syarat perkawinannya telah terpenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan syarat-syarat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang harus dipenuhi¹⁶

Rukun perkawinan mewajibkan adanya:

- a. Calon pengantin pria dan wanita.
- b. Wali.
- c. Saksi.
- d. Akad Nikah.

2.5. Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dalam masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat

¹⁶R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Madar Maju, Bandung, 2002, hlm. 87.

yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.¹⁷

Undang-undang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian yang diakui oleh negara bahwa telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sungguhpun demikian pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftar. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.¹⁸

Untuk pelaksanaan pencatatan suatu perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980, Hal..17.

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hal.. 70-71.

- (1) Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangan-undangan mengenai pencatatan.

2.5.1. Prosedur Perkawinan

Sementara itu prosedur perkawinan merupakan formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Adapun tentang cara melakukan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dan juga pasal 11 peraturan Pelaksanaan yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
3. Melaksanakan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum

perkawinan dilangsungkan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau oleh wakilnya dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama isteri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3 s/d 5 Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975).

Pengumuman tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ia telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkan perkawinan (Pasal 8 jo 6,7 dan 9 Peraturan pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975).

Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhirnya sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat perkawinan (wali nikah bagi yang beragama islam) dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975) apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan di kantor pencatat

perkawinan, menurut hukum negara pasangan tersebut tidak tercatat sebagai orang yang terikat dalam perkawinan (tidak dalam status kawin) dan mereka tidak tunduk pada ketentuan Undang-undang Perkawinan. Sebab negara (Undang-undang) menetapkan bahwa pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan disamping pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka perkawinan tersebut menjadi sempurna, sah menurut agama dan sah menurut negara.

Dari ketentuan-ketentuan di atas jelaslah betapa besarnya peranan hukum agama dalam menentukan sahnya tidaknya suatu perkawinan disamping itu tampak pula adanya hubungan saling melengkapi antara Undang-undang Perkawinan nasional dengan hukum perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu¹⁹

Akta Perkawinan Sebagai Alat Bukti

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang telah berlaku, akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah

¹⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 22-25.

tercatat secara resmi. (Pasal 11 ayat (1-3) Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975).

Akta perkawinan itu dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam Wilayah Kantor pencatatan perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 13 Peraturan pelaksanaan Nomor 9 tahun 1975).

Akta perkawinan itu memuat sebagai berikut:

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami/isteri terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orangtua mereka.
3. Izin kedua orangtua bagi yang melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun, atau dari wali atau dari pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2-5) Undang-undang Perkawinan.
4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria, di bawah umur 16 tahun bagi wanita.
5. Izin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang isteri.
6. Persetujuan dari kedua calon mempelai.

7. Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI.
8. Perjanjian kawin jika ada.
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Dengan adanya akta perkawinan itu maka suami isteri bersangkutan mempunyai alat bukti kawin sah berdasarkan Undang-undang Perkawinan, yang dapat digunakan dimana perlu, baik sebagai suami isteri, maupun sebagai orang tua/keluarga/rumah tangga dan sebagainya.²⁰

2.6. Akibat Hukum dari Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai hal penting yaitu :

- a. Hubungan suami istri.
- b. Hubungan orang tua dan anak.
- c. Status harta Perkawinan.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 87.

Undang-undang perkawinan mengatur masalah-masalah itu masing-masing dalam Bab VI (Hak kewajiban Suami-isteri), Bab IX (kedudukan Anak) dan Bab X (Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak), dan Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan).

a. Hubungan suami istri

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan isteri. Terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Hubungan tersebut terdapat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan.²¹

- 1) Antara suami dan isteri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.
- 3) Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin.
- 4) Suatu rumah tangga yang dibina, haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang untuk itu haruslah ditentukan secara bersama.

²¹ K. Wantjik Saleh, *Op-cit*, hlm. 33.

- 5) Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Umpamanya seorang isteri dapat saja mengadakan perjanjian jual beli dan lain-lain, perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suaminya.
- 6) Diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.
- 7) Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan isteri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dinyatakan dengan tegas bahwa suami adalah “kepala keluarga” sedangkan isteri adalah “ibu rumah tangga”. Isteri sebagai ibu rumah tangga, tentulah harus mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya.

b. Hubungan orang tua dan anak

Tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan, dalam Pasal 49 disebutkan bahwa:

- (1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus.

Disamping kewajiban itu, dalam Pasal 47 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Mengenai kekuasaan orang tua tersebut dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara sekandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b) Ia berkelakuan sangat buruk sekali.

(2) Meskipun dalam hal orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak.

Di dalam suatu pembatasan terhadap kekuasaan orang tua disebutkan dalam Pasal 48 bahwa:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”

Disamping kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban anak terhadap orang tua adalah penting sekali, yaitu pertama kali adalah untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Dan sebaliknya, apabila anak telah dewasa, berdasarkan kemampuannya maka anak tersebut berkewajiban memelihara orang tuanya.²²

c. Status harta perkawinan

Undang-undang perkawinan mengatur masalah harta benda dalam Pasal 35 sampai Pasal 37. Pasal 35 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

²² Djoko Prakoso, *Op-cit*, hlm. 25.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Disamping itu dalam Pasal 37 disebutkan bahwa :

(1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sementara itu dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Dari ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan diatas maksudnya adalah jika terjadi putusnya suatu perkawinan, maka mengenai harta bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu bisa hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²³

2.7. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, dalam Pasal 29 disebutkan bahwa:

²³ K. Wantjik Saleh, *Op-cit*, hlm. 34.

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut ketentuan tersebut, bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan.²⁴ Apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan.

Perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung, hanya dapat dirubah dengan suatu persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

²⁴ *Ibid*, hlm. 32.

Pasal 29 Undang-undang Perkawinan tidak mengatur dengan jelas mengenai perjanjian kawin, tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan Pasal 29 tersebut hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian”, itu tidak termasuk “ta’lik talak”. Peraturan pelaksana tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian perkawinan dimaksud hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat di dalam Akta Perkawinan. Karena adanya keharusan itu, maka apabila ada suatu perjanjian, tapi tidak dimuatkan dalam akta, maka perjanjian itu menjadi tidak sempurna.

Untuk mengetahui apa yang diperjanjikan dan apa yang menjadi objek perjanjian perkawinan perlu dilihat Kitab Undang-undang hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam pasal 139-154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta-kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini” (menurut Pasal berikutnya”).

Dari bunyi Pasal 139 tersebut jelaslah bahwa perjanjian kawin mengatur seputar persatuan harta kekayaan yang tujuannya untuk melindungi hak-hak suami isteri.

2.8. Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

2.8.1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain menjadi tunas dan penerus dan cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.

Keberadaan seorang anak diatur dalam peraturan hukum positif Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan, maka pengertian anak belum dewasa adalah mereka yang berada di dalam kekuasaan orang tua dan perwalian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlakunya seseorang sebagai subyek hukum dapat dihitung surut mulai orang itu berada dalam kandungan, asalkan saja pada saat dilahirkan dalam keadaan hidup. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingannya mendasar dan apabila ia dilahirkan dalam keadaan mati, maka dianggap tidak pernah ada. Hak-hak anak yang demikian ini menonjolkan hak untuk dibuktikan, bahwa

anak adalah seseorang yang dilahirkan seorang ibu dan anak mempunyai hak untuk membuktikan dengan jalan menunjuk bahwa seorang wanita adalah ibunya.²⁵ Sedangkan kecakapan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum diberikan pada saat usia tertentu yang membuat orang menjadi dewasa yaitu usia 21 tahun. Sehingga menurut hukum perdata seseorang dianggap dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dan bagi seorang anak belum dewasa atau belum melangsungkan perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapat persetujuan orang tua atau walinya, seperti melangsungkan perkawinan, membuat perjanjian kawin dan menjadi saksi.

Sementara di dalam hukum adat tidak mengenal batas umur yang pasti, yang ada hanyalah anak yang belum dewasa. Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur melainkan kenyataan dan ciri-ciri tertentu. Hal ini karena adanya suatu perubahan terjadi menurut lambat seseorang apakah sudah dewasa, dan tidak didasarkan secara abstrak. Misalnya pada seseorang perempuan ditandai dengan adanya datang bulan (haid) dan pada anak laki-laki sudah mampu bekerja untuk memenuhi nafkah sendiri misalnya dengan menggarap sawah, dan hal lain biasanya terjadi pada saat usia 16 tahun. Sedangkan usia dewasa pada seseorang anak di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 98 ayat (1), yang menjelaskan bahwa batas usia anak yang mampu

²⁵ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 19.

berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Di dalam hukum Islam orang yang belum dewasa dinamakan *saghir* atau *sabi* dan orang yang sudah dewasa dinamakan *baliq*.²⁶

Pengertian anak juga diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989. Konvensi tersebut diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Pengertian anak menurut Pasal 1 konvensi hak anak adalah

“Setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Hal serupa mengenai anak ditegaskan pula di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang kesejahteraan Anak disebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.

Yang mana makna dari anak adalah seseorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar dan baik secara rohani, jasmaniah maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op-cit*, hlm. 68.

Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.²⁷

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Undang-undang tersebut di atas memberikan pengertian tentang anak yang berbeda-beda satu sama lainnya, untuk keseragaman pemahaman tentang hal tersebut, Peneliti lebih mengacu pada pengertian anak yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

2.8.2. Kedudukan Anak

Undang-undang Perkawinan mengenal 2 (dua) macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin,

Mengenai anak sah dan luar kawin dijelaskan di dalam Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan. Di mana dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan kesahan seorang anak, seperti halnya dalam hukum adat, tetapi dalam hukum Islam maupun

²⁷ Maulana Hasan Wadong, *Op-cit*, hlm. 18.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada tenggang waktu kehamilan seorang ibu untuk dapat menyatakan kesahan seorang anak.

Pembuktian anak sah berdasarkan keturunan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah keturunan dari orang-orang yang disebutkan di dalamnya.²⁸

Dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Disebutkan bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Sementara itu mengenai anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Pasal 43 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata ibunya dan keluarga ibunya, ini sesuai dengan dasar pemikiran Hukum Adat yang memberikan hak dan

²⁸ J Satrio, *Op-Cit*, hlm. 87.

kewajiban anak terhadap ibunya dan keluarga ibu. Hal ini merupakan ketentuan nasional berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia baik asli maupun keturunan. Undang-undang Perkawinan dengan demikian memberikan status yang jelas dan pasti bagi seseorang anak luar kawin.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa :

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Tentang pembuktian anak sah berdasarkan keturunan, hal ini diatur dalam Pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibuktikan dalam register Catatan Sipil”

Seorang anak yang lahir sebelum hari keseratus enam puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami, sebagai anak luar kawin. Kecuali sebelum melakukan perkawinan suami isteri tersebut telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. Maka dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya.²⁹ Jadi menurut Kitab Undang-undang

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hlm. 133.

Hukum Perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat perkawinan.

Anak yang lahir diluar perkawinan, misalnya seorang wanita yang mengandung kemudian melahirkan anak tanpa diketahui siapa bapak anak tersebut, maka anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan atau keluarga ibunya saja, dan tidak ada hubungan perdata dengan bapak biologisnya. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dilarang untuk menyelidiki siapa bapak anak tersebut sedangkan terhadap ibunya diperbolehkan.³⁰ Maka dapatlah dijelaskan bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kedudukan anak hanyalah ditentukan tentang anak sah dan anak tidak sah sebagaimana hal ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Hilman Hadikusuma, masyarakat Hukum Adat berbeda dari masyarakat yang modern, dimana keluarga/rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya. Kesemua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang tua yang mengurus dan memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Kedudukan anak-anak tersebut pengaturannya juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat yang bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Bukan tidak jadi masalah tentang sah atau tidaknya anak.

³⁰ *Ibid*, hlm. 134.

Hal mana dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat bersangkutan tetapi yang juga penting adalah menyangkut keturunan dan perwarisan³¹

Hukum adat tidak mengenal tenggang waktu sesudah perkawinan dengan dilahirkannya seorang anak artinya meskipun seorang anak lahir dalam waktu yang amat singkat sesudah pernikahan ibunya, maka suami tersebut tetap dianggap bapaknya.

Sementara itu mengenai kedudukan anak didasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hlm. 135.

Pencatatan ini dibutuhkan pula sebagai bukti apabila terjadi masalah dikemudian hari, oleh karenanya setiap anak yang dilahirkan sebaiknya secepatnya didaftarkan sehingga mendapatkan akta kelahiran, yang dibuat di kantor catatan sipil, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Agar seorang anak dianggap anak sah dari suami ibunya, maka harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau didalam tenggang masa iddah (4 bulan 10 hari) sesudah perkawinan terputus.³²

Seseorang anak yang lahir dalam tenggang waktu 6 bulan setelah pernikahan atau setelah perkawinannya terputus adalah anak tidak sah artinya anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya, tetapi anak tersebut tetap mempunyai hubungan dengan ibu yang melahirkannya. Sedangkan kedudukan anak di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atur dalam Pasal 27, dimana disebutkan bahwa:

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

³² Wiryono prodjodikoro, *Op- cit*, hlm. 60.

- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada suatu keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaanya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Di dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan juga bahwa:

- (1) Pembuatan Akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukan permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Surat/akta lahir membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan paling tidak dari perempuan yang

melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Saat kelahiran dihubungkan dengan status perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak itu, menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak itu.³³

2.8.3. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Hak merupakan alat yang memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan kesempatan ini harus diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum. Kaidah-kaidah hukum yang memberikan kepada para anggota masyarakat untuk mengembangkan bakatnya lebih bermanfaat bagi perkembangan hukum dan demi tercapainya tertib hukum.

Perlindungan anak diperlukan agar seorang anak dapat memperoleh hak dan kewajibannya. Adapun pengertian perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah :³⁴

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan

³³ J. Satroi *Op-cit*, hlm. 86.

³⁴ Emiliana Krinawati, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bandung, 2005, hlm. 3.

kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), dieksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.³⁵

Perlindungan anak ini bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :³⁶

1. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, Pancasila menjadi dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.

³⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, akademi Presindo, hlm. 52.

³⁶ *Ibid.*

2. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam perlindungan anak.
3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan atas UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar-dasar yuridis harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Apabila masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah tertentu, maka sebaiknya diterapkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang menyinggung masalah hukum, hakim dan yurisprudensi. Sebaiknya ini diterapkan untuk mengatasi dengan segera permasalahan perlindungan anak

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak, dapat dilakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Sedangkan perlindungan anak dilakukan secara tidak langsung, tetapi ditujukan kepada orang lain yang

terlibat dalam usaha perlindungan anak, seperti orang tua atau yang terlibat dalam perlindungan anak, yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak; mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang adil.

Sementara itu pengertian perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hanya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁷ Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hukum perlindungan anak menjamin hak-hak anak dan kewajiban anak yang dapat berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan peraturan lain yang menyangkut anak.

Komunitas dunia pertama kali peduli terhadap perlindungan hak-hak anak dituangkan dalam suatu Konvensi Hak Anak 1989. Konvensi tersebut diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990.

³⁷ *Ibid*, hlm. 53.

Adapun Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah : ³⁸

1. Tidak diskriminatif

Menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

2. Meletakkan anak dalam konteks hak-haknya untuk bertahan hidup dan berkembang. Negara semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

3. Kepentingan terbaik untuk anak

Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.

4. Memperbesar peluang anak untuk berpartisipasi untuk menyatakan pendapat dalam segala hal.

Tujuan perlindungan anak adalah³⁹

- a. Tercapainya kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik secara fisik, mental dan sosial.

³⁸ *Pedoman Perlindungan Anak*, Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial, Jakarta, hlm 16.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

- b. Terlindunginya anak dari tindak kekerasan dan/atau perlakuan salah, ketelantaran, eksploitasi, perlakuan diskriminatif dan situasi-situasi yang menghambat atau membahayakan kelangsungan hidupnya.
- c. Terwujudnya dan berkembangnya kepedulian serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam melindungi hak anak.

Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan mengenai Hak anak sebagai berikut:

- 1) Anak berhak dipelihara dan dididik oleh orang tua mereka dengan sebaik-baiknya. (Pasal 45 ayat (1))
- 2) Anak berhak berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.(Pasal 47 ayat (1))
- 3) Anak berhak diwakili orang tua mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan Pasal 47 Ayat (1).
- 4) Anak berhak mendapat biaya pemeliharaan dari orang tua meskipun dalam hal orang tua dicabut kekuasaannya. Pasal 49 ayat (2)

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak anak :⁴⁰

- “a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

⁴⁰ Emiliana Krisnawati, , *Op-cit*, hlm 4.

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi Warga Negara yang baik dan berguna
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, dan
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Didasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk :⁴¹

- 1. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi hak anak.
- 2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Anak didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak

⁴¹ Darwan Prinst, *Hukum anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 150.

memperoleh kewarganegaraan dan sejauh yang memungkinkan dipelihara oleh orang tuanya.(Pasal 5)

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.(Pasal 5)

4. Hak untuk mengetahui orang tuanya. (Pasal 7)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya, dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya (pasal 10)

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan

8. Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang. (Pasal 11)

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9. Hak anak penyandang cacat. (Pasal 12)

Setiap anak penyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10. Berhak mendapat perlindungan. (Pasal 13)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

11. Hak diasuh orang tuanya. (pasal 14)

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan pertimbangan terakhir. Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dan orang tuanya.

12. Hak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan

dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15)

13. Hak memperoleh perlindungan dan penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1))

14. Hak memperoleh kebebasan. (Pasal 16 ayat (2))

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

15. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku (Pasal 16 ayat (3)).

16. Hak anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat (1))

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Seorang anak sebagai subyek hukum mempunyai hak-hak sipil dan kemerdekaan, maksudnya adalah hak-hak seorang yang diperoleh atau merupakan kewajiban negara untuk mewujudkannya. Hak-hak sipil

meliputi hak untuk memperoleh identitas, hak mempertahankan identitas, kebebasan berserikat, perlindungan atas kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang layak, perlindungan dari perenggutan kemerdekaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pencatatan perkawinan ini mempunyai fungsi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan yang merupakan suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai bukti telah dilangsungkan suatu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pembuktian sehingga dengan dilakukan pencatatan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik.

Harusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama tersebut harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan

diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi alat bukti telah terjadinya perkawinan.

Diterbitkan Akta Perkawinan sebagai bukti terjadinya perkawinan yang sah, karena akta-akta yang dibuat pada Catatan Sipil mempunyai kegunaan sebagai alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang, memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang kejadian kelahiran dalam hal ini kedudukan hukum seorang anak. Ini berarti bahwa pencatatan suatu perkawinan mempunyai peranan yang sangat menentukan, dengan adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut diakui oleh negara dan hal ini mempunyai akibat hukum yang pasti bagi yang bersangkutan, khususnya dalam hak waris anak-anak.

Pencatatan perkawinan mempunyai akibat hukum kepada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Undang-undang perkawinan mengenal dua macam status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pengertian anak sah dalam Undang-undang Perkawinan tersebut juga dapat diartikan anak itu lahir akibat suatu perkawinan yang sah antara sepasang suami isteri, meskipun ternyata si anak secara biologis

bukan anak dari suami yang mengawini ibu si anak, dapatlah diartikan anak sah dalam arti sempurna adalah anak yang menurut darahnya merupakan keturunan dari kedua orang tua

Perkawinan harus dicatat sehingga memenuhi ketentuan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan karena Undang-undang memang menghendaki dicatatkannya suatu perkawinan. Hal ini sebagai syarat sahnya suatu perkawinan disamping untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban, serta berhubungan dengan status sipil seseorang khususnya dengan status keperdataannya sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak sah sebagai anak sah maka anak tersebut akan memiliki hak nafkah hidup, hak waris baik dari ibu dan ayahnya serta keluarga ibu maupun keluarga ayahnya

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap dilahirkan dari suatu perkawinan tidak sah sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak tidak sah dan kedudukannya menjadi anak luar kawin. Mengenai kedudukan anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menegaskan bahwa :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Isi Pasal 43 Undang-undang perkawinan tersebut sesuai dengan dasar pemikiran Hukum Adat yang memberikan hak dan kewajiban anak terhadap ibunya dan keluarga ibunya. Anak diberikan status keperdataan

yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluarga ibu, hal ini merupakan ketentuan nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia baik asli maupun keturunan. Undang-undang Perkawinan dengan demikian memberikan status yang jelas dan pasti bagi seorang anak luar kawin

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak adalah kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang sah.

Menurut Arist Merdeka Sirait bahwa, dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut jadi akta kelahiran merupakan dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya baik dari orang tuanya sendiri maupun dari negara.⁴²

Bahwa pada dasarnya bagi perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut negara, terhadap mereka baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menurut hukum tidak akan mendapat perlindungan hukum yang pasti dan

⁴² Wawancara dengan Bapak Arist Merdeka Sirait, ketua Komnas Perlindungan Anak, pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2009

tegas salah satunya adalah dalam hal nafkah hidup dan juga hak waris. Anak tidak akan mendapatkan hak waris dari ayah dan keluarga ayahnya karena anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya akibatnya dia hanya punya hak waris dari ibu dan keluarga ibu, yang mempunyai hak waris dari ayahnya hanyalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian penulis dilapangan, dimasyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, hal ini disebabkan, perkawinan dilakukan secara dibawah tangan, sehingga mengakibatkan akan berdampak kepada hak waris terutama hak waris anak. Hal tersebut juga dipertegas oleh Pengadilan Negeri Bekasi, berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tanpa izin dari pengadilan maka perkawinan tersebut tidak sah, terhadap mereka baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan menurut hukum tidak akan mendapat perlindungan hukum yang pasti dan tegas dalam hal waris dari bapak biologisnya, sedangkan si anak hanya berhak mewaris dari ibu dan keluarga ibunya.⁴³

Disamping itu perkawinan yang tidak dicatatkan juga akan berakibat terlanggarnya hak anak yang lain antaranya terabaikannya hak anak seperti hak mendapat pemeliharaan yang baik dari orang tuanya pada kenyataannya banyak pernikahan yang tidak dicatatkan yang terkadang

⁴³ Wawancara dengan Ibu Suharmini, SH, Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pada hari Senin, Tanggal 2 Februari 2009

menimbulkan tidak adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya terutama ayah, anak tidak dapat pendidikan yang baik serta hak lainnya. Karena tanpa pencatatan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai hubungan hukum baik dengan ayah maupun keluarga ayahnya.

Menurut Pengadilan Negeri Bekasi sebaiknya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama masing-masing, hendaknya dicatatkan sehingga diakui oleh hukum negara dan mendapatkan perlindungan hukum yang tegas tidak hanya dalam hukum waris maupun hak-hak lainnya seperti hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan yang baik dari orang tuanya, hak mendapatkan nafkah hidup, hak mendapatkan pendidikan dan yang paling penting hak untuk mendapatkan identitas berupa akta kelahiran.⁴⁴

Peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti perkawinan perlu dicatatkan, sehingga dengan adanya pencatatan akan ada hubungan hukum antara suami-isteri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga mereka mendapatkan status yang jelas dan diakui keberadaanya oleh negara. Dan dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

3.1.1. Faktor Penyebab Suatu Perkawinan tidak Dicatatkan

Walaupun Undang-undang Perkawinan sudah dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dicatatkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), namun dalam praktiknya masih banyak

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Suharmini, SH, Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pada hari Senin, Tanggal 2 Februari 2009

perkawinan yang tidak dicatatkan adapun alasan-alasan suatu perkawinan tidak dicatatkan adalah :

1. Perkawinan Antar Pasangan yang Berbeda Agama

Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian pencatatan perkawinan di dasarkan pada agama dan kepercayaannya, yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama dan yang bukan beragama Islam di Kantor Catatan Sipil.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan di 2 (dua) instansi yang berbeda menyebabkan kesulitan bagi perkawinan beda agama. Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama tidak mau mencatatkan perkawinan yang bukan berdasarkan Agama Islam. Begitu juga dengan Kantor Catatan Sipil tidak mau mendaftarkan perkawinan beda agama itu, karena Undang-undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama.⁴⁵ Undang-undang Perkawinan hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia (lihat Pasal 56 Undang-undang Perkawinan) dan dapat didaftarkan di Indonesia asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara mana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia sendiri perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

⁴⁵. Wawancara dengan Ibu Suharmini, SH, Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pada hari Senin, Tanggal 2 Februari 2009

Seperti yang marak dewasa ini, solusi penyelesaian perkawinan beda agama antara lain dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum yang diberikan oleh Pasal 56 Undang-undang Perkawinan. Sehingga banyak pasangan beda agama yang melakukan perkawinan di luar negeri dan sewaktu kembali ke Indonesia mereka mencatatkan perkawinannya di Indonesia.

2. Perkawinan Syiri'

Perkawinan yang hanya dilangsungkan secara agama dan sudah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan tetapi tidak didaftarkan disebut juga perkawinan syiri'. Perkawinan seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat kita dan biasanya terjadi pada pasangan yang masih berusia remaja. Perkawinan yang hanya dilaksanakan secara ketentuan agama saja tanpa dicatatkan biasanya dilakukan supaya tidak terjadi zina atau hubungan diluar nikah sehingga para orang tua menyarankan untuk dilakukan pernikahan secepatnya.

Perkawinan syiri' ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang, misalnya mempelai belum cukup umur, mempelai perempuan tidak mendapat izin wali dan lain sebagainya.
2. Perkawinan tersebut tidak ingin diketahui umum. Penyebabnya biasanya adalah faktor sosial dan pengaruh budaya, misalnya saja, pernikahan terhadap anak yang masih belum dewasa dengan restu orang tua karena takut anak-anak tersebut

melakukan zina, perkawinan anak-anak karena hamil di luar nikah atau perkawinan yang dilakukan diam-diam karena salah satu mempelai terikat kontrak kerja yang boleh melakukan pernikahan selama kontrak kerja berlangsung dan lain sebagainya.

3. Masalah biaya, biaya menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan syiri', mengingat masih tingginya biaya yang dikenakan terhadap perkawinan yang dilangsungkan.

Hal tersebut di atas menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak mendaftarkan perkawinannya, sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut tidak diakui secara hukum.⁴⁶

3. Perkawinan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada kenyataannya harus diakui bahwa tidak seluruh penduduk Indonesia adalah pemeluk agama tertentu, terdapat sebagian penduduk asli yang menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan perkawinan mereka dilaksanakan dengan tatacara adat masing-masing. Jelas mereka tidak termasuk ke dalam katagori non Islam, jadi perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut adat, perlu didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, tetapi Kantor Catatan Sipil tidak mau mendaftarkan perkawinan mereka

⁴⁶ *Ibid.*

dengan alasan Indonesia tidak mengenal pelangsungan perkawinan secara adat.⁴⁷

4. Perkawinan Poligami yang Tidak Memenuhi Syarat

Undang-undang Perkawinan memperbolehkan perkawinan poligami (satu suami dengan banyak istri), namun dengan pembatasan tertentu. Seringkali dalam kenyataannya dilapangan untuk memenuhi persyaratan dapat dilangsungkan perkawinan kedua bagi seorang suami sangat sulit diantaranya tidak mendapatkan izin dari isteri pertama, maka yang dapat dilakukan oleh suami adalah membuat kartu identitas palsu yang menerangkan dia dalam keadaan tidak kawin, sehingga “Buku Nikah” yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, asli tetapi palsu (Aspal). Di lain pihak, dapat pula terjadi dibuat “Buku Nikah” yang sama sekali Palsu, dalam arti tidak dibuat oleh pejabat berwenang, bukunya dapat asli dapat pula palsu, dalam arti tidak ada pencatatan perkawinan.⁴⁸

Anak yang lahir dari perkawinan ini, tentunya karena pencatatan ada pada instansi yang berbeda dapat dengan mudah dicatatkan. Masih terdapat berbagai masalah hukum, yang berakibatkan akibat hukum, yang tentunya bagi orang awam dianggap bukan masalah, namun bagi kepentingan sebuah negara hukum, adalah masalah yang besar dan dapat menimbulkan kekacauan yang cukup

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Mansyur Syah, SH, Wakil Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada hari Senin, Tanggal 9 Februari 2009

memprihatinkan hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat kalangan atas atau orang-orang yang secara ekonomi mapan.⁴⁹

Disamping itu selain 4 (empat) Faktor diatas disadari terdapat banyak kendala yang dihadapi pemerintah dan badan kependudukan dan kantor catatan sipil (BKKCS), untuk menyadarkan penduduk agar mau mencatatkan perkawinan. Salah satu kendala yang utama adalah ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya fungsi pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia itu dalam hal ini terutama pencatatan perkawinan.⁵⁰

Selain ketidaktahuan masyarakat akan kegunaan dari pencatatan peristiwa penting dalam hidup manusia, juga karena biaya pendaftaran yang dirasakan cukup mahal oleh masyarakat, jangankan untuk membayar biaya pendaftaran, untuk hidup sehari-hari saja bagi sebagian besar penduduk dirasakan cukup sulit dipenuhi. Disamping itu kesulitan untuk mencatatkan perkawinan juga dirasakan oleh perkawinan bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan karena untuk memenuhi persyaratan perkawinan supaya tercatat adalah meminta surat keterangan mengenai status diri dari negara asalnya dan sulit untuk mengurus surat tersebut sehingga banyak perkawinan yang berbeda kewarganegaraan tersebut dilangsungkan tanpa pencatatan.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Suharmini, SH, Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pada hari Senin, Tanggal 2 Februari 2009

Kemudian sangat banyak pula perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1975.⁵¹

Saat diberlakukannya Undang-undang tentang Perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak dapat dipungkiri setelah diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut pun, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, karena berbagai alasan diatas. Selain itu dicatatkan perkawinan di dua instansi, yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, juga menimbulkan berbagai masalah.

Ada banyak hal yang menyebabkan seorang tidak bisa mencatatkan perkawinannya, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran karena dasar untuk dicatatkan kelahiran bagi seorang anak adalah tercatatnya perkawinan orang tuanya. Disamping alasan tersebut banyak juga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tercatat tapi tidak memiliki akta kelahiran yang sah, hal ini disebabkan para orang tua tidak memahami arti penting akta kelahiran, karena pembuatan akta dinilai terlalu sulit dan mahal.

Selain karena kurangnya pencatatan kelahiran yang komprehensif, birokrasi berbelit-belit dan sistem yang terlalu tersentralisir juga mengakibatkan masyarakat menjadi apatis untuk mencatatkan kelahiran

⁵¹ *Ibid.*

anak mereka. Ada banyak kasus dimana oknum perantara mengambil keuntungan dari mekanisme pencatatan sipil ini. Akibatnya, orang harus membayar uang pelicin pada perantara dengan kisaran Rp100.000 sampai Rp 800.000 untuk mengurusnya. Jelas ini membebani sebagian besar orang Indonesia. Situasi ini semakin rentan untuk pemalsuan identitas dan umur sehingga rawan terjadinya eksploitasi. Sementara itu, ketiadaan data demografis yang akurat dari pemerintah akan membuat pelaksanaan program kesehatan dan pendidikan, dan tentu bidang lainnya, tidak tepat.⁵²

3.1.2. Pengakuan Adanya Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pengakuan adanya perkawinan yang sah. Hal ini penting karena membawa konsekuensi pada manusianya maupun hubungan-hubungan hukum yang timbul baik menyangkut harta bersama, hak mewaris, maupun pengakuan terhadap anak sah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik.

⁵² Wawancara dengan Bapak Arist Merdeka Sirait, Sekjen KOMNAS Anak, Pada hari Rabu, Tanggal 11 Februari 2009.

Peristiwa penting dalam kehidupan seseorang perlu dicatatkan. Tidak adanya pencatatan tentang segala hal yang berhubungan dengan keperdataan seseorang mengakibatkan orang yang tidak dicatatkan tersebut tidak mendapatkan status yang jelas dari negara. Keadaan demikian akan menyulitkan orang tersebut jika dikemudian hari dibutuhkan bukti otentik untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya.

Bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh satu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan seseorang.

Apabila peristiwa yang penting dalam hidup manusia termaksud tidak dicatatkan dalam register catatan sipil tersebut, maka akan timbul ketidak pastian hukum terutama tentang status keperdataan seseorang.

Oleh karena itu didasarkan Undang-undang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dimana dalam ayat (2) disebutkan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didasarkan Pasal 2 (2) Undang-undang Perkawinan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam satu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang

husus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Hal ini dilakukan dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan agar tercapai kepastian hukum, pencatatan perkawinan itu sangat diperlukan karena dalam negara mengatur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan berkaitan erat dengan waris-mawaris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Walaupun Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Nomor 9 Tahun 1975 telah menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama harus dicatat tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan.

Seharusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi alat bukti telah terjadinya perkawinan.⁵³

⁵³ Wawancara dengan Ibu Yeyet Nurhayati, SH, Kepala Seksi Kelahiran , Kematian Adopsi Anak Ganti Nama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Bekasi, Pada Hari Kamis, Tanggal 5 Februari 2009

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak menurut hukum adalah subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya dan dibuktikan asal usulnya dengan akta kelahiran, kemudian mempunyai apa yang dikenal sebagai kewenangan berhak (*rechtsbevoegdheid*) sejak dilahirkan sampai mati. Bahkan anak di dalam kandungan dianggap telah ada kalau kepentingan menghendaki, dengan syarat lahir hidup (Pasal 2 KUHPerdara).

Negara mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan hidup anak, sebagai generasi penerus yang pada gilirannya akan meneruskan kelangsungan negara. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak, selain sebagai hak setiap subjek hukum untuk mendapatkannya, ada pula kepentingan negara untuk melaksanakannya.

Perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu sisi perlindungan anak. Hukum perlindungan anak merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak dibidang hukum. Perlindungan anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan salah (*child abused*) baik langsung maupun tidak langsung, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan wajar, baik fisik, mental dan sosial.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak menetapkan :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Kepentingan negara terhadap kesejahteraan dan kelangsungan generasi penerus, melahirkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya adalah perlindungan hukum anak.

Pentingnya perlindungan hukum anak dengan dilakukannya pencatatan kelahiran, selain untuk kepentingan administrasi negara, juga untuk kepentingan anak itu sendiri apabila anak telah menjadi dewasa dan harus memenuhi kepentingannya sendiri dalam melakukan bermacam-macam aktivitas yang antara lain melakukan pekerjaan.

Untuk dapat menghidupi diri sendiri, manusia harus bekerja mencari nafkah, meskipun pekerjaannya dilakukan secara mandiri, namun dalam aktivitasnya selalu akan berhubungan dengan orang lain perlu mempunyai identitas diri dan dasar dari identitas itu adalah surat kelahiran atau disebut juga akta kelahiran.

Kewajiban negara dalam memberi perlindungan hukum melalui pencatatan kelahiran, adalah dengan antara lain memberikan kemudahan pendaftaran kelahiran, dalam arti dibuat petunjuk pelaksanaan yang mudah dimengerti dan tidak menyulitkan dalam pengurusan. Kemudian Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil perlu koordinasi dengan desa dan rumah sakit, dalam hal ada hal-hal yang meragukan sehingga tidak terjadi kesalahan yang nantinya berakibat fatal.

Menurut Arist Merdeka Sirait Sekjen Komisi Nasional Pelindungan Anak Pendaftaran dimanapun selalu membutuhkan biaya, namun untuk hal yang satu ini, pencatatan kelahiran, yang mempunyai fungsi yang demikian besarnya, perlu diberi keringanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang paling bawah bahkan kalau bisa diberikan secara gratis. Pemberian akta kelahiran secara gratis telah dicanangkan oleh pemerintah pada akhir Tahun 2006 namun pada praktiknya tetap saja ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan akta kelahiran ini.⁵⁴

Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan tidak adanya Akta Perkawinan. Perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya Akta Perkawinan, sehingga mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin karena dalam Akta Kelahirannya hanya tercantum nama ibunya saja.

Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan memperoleh kedudukan sebagai

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Arist Merdeka Sirait, tanggal 11 Februari 2009

anak sah bagi pasangan yang beragama Islam dalam praktik sering dilakukan yaitu dengan mengikuti acuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sendiri berbunyi :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama
- (3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Itsbat Nikah tersebut dalam permohonannya meminta agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan yang telah berlangsung. Pengadilan setelah meneliti berdasarkan alat bukti dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Penetapan-penetapan Itsbat Nikah dilatarbelakangi karena perkawinan dilakukan tidak di hadapan atau di bawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikah, sehingga tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan tersebut dengan Akta Perkawinan. Penetapan-penetapan tersebut juga dilatarbelakangi yaitu keperluan Akta Perkawinan guna mengurus Akta Kelahiran anak.

Akta perkawinan tersebut sebagai salah satu syarat untuk dapat dikeluarkannya Akta kelahiran yang di dalamnya menyebutkan bahwa anak yang lahir tersebut merupakan anak sah dari ayah dan ibu yang disebutkan pada akta kelahiran tersebut berdasarkan Akta Perkawinan kedua orang tuanya.

Pembuktian anak sah berdasarkan keturunan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Surat/akta lahir memang membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Saat kelahiran dihubungkan dengan status perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak itu, menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak itu.

Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa :

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Disebutkan bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 27, disebutkan bahwa :

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada suatu keterangan dari orang

yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaanya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya

Pencatatan ini dibutuhkan pula sebagai bukti apabila terjadi masalah dikemudian hari, oleh karenanya setiap anak yang dilahirkan sebaiknya secepatnya didaftarkan sehingga mendapatkan akta kelahiran, yang dibuat di Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil menegaskan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta kelahiran
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan/
Pengesaaan Anak

5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Sementara itu untuk Perkawinan bagi pasangan selain Islam yang pencatatannya dilakukan di kantor catatan sipil upaya yang dapat dilakukan apabila perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di kantor sipil maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya bisa diakui dengan cara pengesahan anak sehingga anak tersebut menjadi anak sah.

Pengesahan anak sehingga anak tersebut menjadi anak yang sah hanya dapat dilakukan apabila orang tuanya mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil terlebih dahulu sedangkan sebelum perkawinan dicatatkan maka anak tersebut hanya bisa mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ibu saja atau disebut juga sebagai anak luar kawin.⁵⁵

Setelah dilakukan upaya hukum tersebut dengan diterbitkan akta nikah kemudian Akta kelahiran anak, barulah seorang anak bisa mendapat perlindungan hukum dan kedudukannya menjadi anak sah, sehingga memperoleh hak-haknya sebagai subyek hukum yaitu mempunyai hak-hak sipil dan kemerdekaan, maksudnya adalah hak-hak seorang yang diperoleh atau merupakan kewajiban negara untuk mewujudkannya. Hak-hak sipil meliputi hak untuk memperoleh identitas, hak mempertahankan identitas, kebebasan berserikat, perlindungan atas

⁵⁵ Wawancara dengan Yeyet Nurhayati, SH, Kepala Seksi Kelahiran , Kematian Adopsi Anak Ganti Nama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Bekasi, Pada Hari Kamis, Tanggal 5 Februari 2009

kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang layak, perlindungan dari perenggutan kemerdekaan.

Dalam wawancara dengan peneliti, Yeyet Nurhayati S.H., Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Adopsi Anak, Ganti Nama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Bekasi:⁵⁶

“Dalam praktik pihak Kantor Catatan Sipil memerlukan keterangan pembuktian pernikahan, sebagai salah satu syarat untuk dapat dibuatkan Akta Kelahiran. Pencatatan sipil terhadap setiap peristiwa hukum yang terjadi akan berpengaruh dalam masalah perkawinan, pewarisan, kematian dan status seorang anak”

Dengan demikian, setelah adanya pengesahan akta kelahiran, maka anak akan memperoleh jaminan perlindungan hukum yang formal. Sebagai sesuatu lembaga hukum, Pemerintah harus mengatur agar kepentingan- kepentingan anak tersebut terjamin.

Mengenai hak anak ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan mengenai hak anak sebagai berikut :

- a. Anak berhak dipelihara dan dididik oleh orang tua mereka dengan sebaik-baiknya. (Pasal 45 ayat (1))
- b. Anak berhak berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (Pasal 47 ayat (1))
- c. Anak berhak diwakili orang tua mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 Ayat (1)).

⁵⁶ *Ibid.*

- d. Anak berhak mendapat biaya pemeliharaan dari orang tua meskipun dalam hal orang tua dicabut kekuasaannya.(Pasal 49 ayat (2))

Lebih khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk.

Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini sesuai dengan ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi hak anak.

- (1) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Anak didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh yang memungkinkan dipelihara oleh orang tuanya.(Pasal 5)
- (2) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya, dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya

(3) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

(4) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya..

(5) Berhak mendapat perlindungan. (Pasal 13)

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

(6) Hak diasuh orang tuanya. (pasal 14) Setiap anak berhak untuk

diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan pertimbangan terakhir. Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dan orang tuanya.

(7) Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi Pasal 16 ayat (1)

Sementara itu kalau kita merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka seharusnya mengenai akta kelahiran anak tidak akan ada masalah karena undang-undang ini non diskriminasi artinya tidak dibeda-bedakan apakah anak-anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang dicatatkan atau tidak. Disamping itu

dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Identitas tersebut berupa akta kelahiran dan karena identitas tersebut merupakan hak seharusnya tanggung jawab negaralah untuk memberikannya namun kalau dilihat dalam praktiknya akta kelahiran bagi seorang anak sangat sulit diperoleh apalagi kalau dilihat dari data yang telah disebutkan bahwa sekitar 40% anak Indonesia tidak mempunyai akta kelahiran.

Untuk itu seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dan dapat mengeluarkan Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur lebih lanjut secara jelas dan tegas mengenai hak-hak anak terutama hak yang paling mendasar yaitu untuk mendapatkan akta kelahiran sehingga semua anak mendapatkan Akta kelahiran dan diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan diberikan hak-haknya yang lain seperti yang telah disebutkan diatas

Hak Anak Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Permasalahan yang sangat mendasar mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah mengenai terlanggarnya Hak Anak yaitu kesulitan mendapatkan Identitas berupa akta kelahiran, padahal akta kelahiran merupakan hak anak pertama yang seharusnya diberikan oleh negara. Undang-undang Perlindungan Anak

menyatakan dengan jelas bahwa setiap anak berhak mendapatkan identitas. Dalam arti Undang-undang ini tidak membedakan anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau dari orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan. Karena dalam Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan dampak yang besar terhadap hak-hak anak, terutama hak anak untuk mendapatkan identitas atas kelahiran mereka sebagai bentuk pengakuan dari orang tua maupun dari Negara. Kesulitan mendapatkan identitas mengakibatkan banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat ini hanya 40% anak-anak Indonesia pada usia 5 tahun yang memiliki akta kelahiran, sisanya tidak mempunyai catatan kelahiran dan tidak mempunyai akta, akibatnya mereka terancam hak-haknya sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sulitnya birokrasi dan adanya diskriminasi,

Praktiknya pada saat orang tua ingin mendaftarkan kelahiran anaknya kecatatan sipil sebagai instansi pemerintah harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi antara lain dikenakan biaya, mengenai biaya ini setiap catatan sipil di masing-masing daerah menentukan besarnya biaya berbeda-beda tergantung kebijaksanaan masing-masing

daerah karena biaya pencatatan ini dijadikan sumber pemasukan untuk pembiayaan daerah. Biaya pencatatan berkisar Rp20.000-Rp60.000.

Kendala utama seorang anak mendapatkan haknya perihal identitas, adalah tidak tercatatnya perkawinan orang tuanya sehingga tidak mencukupi syarat untuk melakukan pendaftaran di Kantor Catatan Sipil. Selain itu biaya yang relative mahal dan berbedanya besar biaya yang harus dikeluarkan di tiap daerah juga menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat kemampuan financial masyarakat pelaku perkawinan yang tidak dicatat ini banyak yang merupakan masyarakat miskin. Lokasi kantor catatan sipil yang tidak tersebar secara merata di seluruh Indonesia, ikut mempengaruhi minat masyarakat dalam mencatatkan kelahiran yang terjadi. Mengenai prosedur dan persyaratan yang rumit serta tingkah laku petugas pencatatan yang tidak kondusif juga merupakan penyebab rendahnya keinginan masyarakat untuk mencatatkan sebuah peristiwa kelahiran.

Pencatatan kelahiran mempunyai/memiliki beberapa arti penting antara lain. :

- a. Statusnya sebagai bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan seorang anak
- b. Merupakan hal dasar bagi dipenuhinya hak-hak anak yang meliputi memberikan kepastian pada anak untuk masuk sekolah pada usia yang tepat, penegakkan dan perlindungan hukum bagi pekerja dibawah umur, memastikan anak-anak yang berada di

wilayah konflik mendapatkan perlindungan khusus dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa

- c. Melindungi anak-anak muda dari paksaan memasuki wajib militer pada usia yang tidak semestinya
- d. Melindungi anak dari perlakuan salah yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak yang berwenang
- e. Memastikan seorang anak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan pada saat dilahirkan
- f. Melindungi anak dari kemungkinan menjadi komoditas dalam perdagangan anak dan pada saatnya menjamin seorang anak untuk mendapatkan paspor dan memperoleh pekerjaan
- g. Terpenuhi hak anak untuk dipilih dan memilih nantinya.

Akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara.

Tanpa akta kelahiran, hak-hak asasi anak dapat diperkosa seenaknya. Mereka bisa dijebloskan sebagai pekerja di bawah umur, diperas tenaganya tanpa dapat membela diri, diperdagangkan di pasar gelap, dan diadopsi secara tidak sah. Mereka juga tidak mendapat layanan kesehatan, tak dapat mengklaim hak-haknya secara legal. Mereka tidak dapat memiliki akses pada pendidikan (tidak mendapatkan pelayanan publik) yang akhirnya menyingkirkan dan meminggirkan

mereka dalam kehidupan sosial. Hal ini mengakibatkan terhapusnya catatan sejarah anak Indonesia yang tak memiliki identitas. Undang-undang Perlindungan Anak sebenarnya menyebutkan bahwa pembuatan akta kelahiran anak adalah gratis. Sekalipun blankonya masih tetap harus dibeli. Namun diakui, Undang-undang Perlindungan Anak tersebut tampaknya masih harus disosialisasikan sekaligus juga dipatuhi.

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akta kelahiran. Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas. Artinya catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas.

Bagi pemerintah, akta kelahiran membantu menelusuri statistik demografis, kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan serta program pembangunan pun akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan.⁵⁷

Perkawinan dan kelahiran dapat dikatakan sebagai dua sisi dari sebuah mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan, dalam arti

⁵⁷ Wawancara Dengan Yeyet Nurhayati, SH, Kepala Seksi Kelahiran , Kematian Adopsi Anak Ganti Nama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Bekasi, Pada Hari Kamis, Tanggal 5 Februari 2009

perkawinan adalah salah satu cara untuk membentuk lembaga keluarga, di dalam sebuah keluarga terdapat pengertian adanya anak-anak. Perkawinan dapat mengakibatkan terjadinya kelahiran, tetapi suatu kelahiran belum tentu diakibatkan oleh lembaga perkawinan.

Kaitan yang erat antara pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, tentunya tidak dapat disangkal oleh siapapun. Apabila tidak adanya pencatatan perkawinan, maka tidak akan ada pula pencatatan kelahiran anak sah.

Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mencatat kelahiran adalah lembaga catatan sipil. Tugas yang diemban menjadi berat dan juga penuh dengan masalah, selain karena belum adanya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya arti dari pencatatan kelahiran, juga sebagai hasil ikutan dari masalah yang timbul sebagai akibat dari dualisme pencatatan perkawinan.⁵⁸

Arti dari pencatatan perkawinan adalah pengakuan terhadap adanya perkawinan yang sah, yang berakibat hukum apa yang dikenal pada “akibat perkawinan”, yaitu terhadap keturunan dan harta benda perkawinan.

Perkawinan yang sah (pelangsungannya) dan didaftarkan dilembaga pencatat perkawinan, membawa konsekuensi anak yang lahir di dalam perkawinan yang telah didaftarkan adalah anak yang sah. Konsekuensi

⁵⁸ Wawancara dengan Yeyet Nurhayati, SH, Kepala Seksi Kelahiran , Kematian Adopsi Anak Ganti Nama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Bekasi, Pada Hari Kamis, Tanggal 5 Februari 2009

bagi anak tidak sah secara hukum, pencatatan kelahirannya hanya menimbulkan hubungan hukum dengan pihak ibu dan keluarga ibu, pihak “ayah” dianggap oleh hukum sebagai tidak pernah ada (Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan).

Seperti juga pencatatan perkawinan, adalah hak setiap individu untuk dicatatkan, maka pencatatan kelahiran adalah hak setiap warganegara dan menjadi kewajiban dari pegawai pencatat kelahiran untuk mencatatkan setiap kelahiran, tidak terkecuali kelahiran siapapun juga.

Selain itu, belum diberlakukannya keharusan untuk menunjukan pembuktian asal usul seseorang (Pasal 55 Undang-undang perkawinan), berdasarkan akta kelahiran dalam setiap kegiatan sehingga seseorang di Indonesia ini masih dapat dinyatakan ada, meskipun tanpa adanya akta kelahiran.

Jelas bagi Indonesia, keadaan seperti ini adalah keadaan yang sangat sulit, apabila memberlakukan tentang pembuktian asal usul seseorang hanya dengan menunjukan akta lahir, banyak sekali penduduk yang menjadi tidak ada asal usul untuk kepentingan selanjutnya seperti antara lain untuk kartu penduduk, kartu keluarga akan melanggar asas ketertiban hukum dan kepastian hukum.

Di negara-negara maju, arti dari pencatatan kelahiran menjadi sedemikian penting dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, dimana semua data telah dikomputerisasikan, sehingga untuk mencari data seseorang, tidak dapat lagi hanya mengandalkan kepada nama,

maka tanggal kelahiran menjadi sangat penting dan memerlukan adanya pencatatan kelahiran.

Pencatatan perkawinan bagi pemeluk Agama Islam dilakukan oleh kantor pencatat perkawinan yang ada di bawah naungan Departemen Agama. Kantor Urusan Agama, mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pelaksanaan dan sekaligus juga pencatatan perkawinan. Di satu sisi, karena pelaksanaan dan pencatatan dilakukan didalam suatu lembaga, yaitu oleh Departemen Agama, adalah hal yang sangat baik. Namun di sisi lain dapat menimbulkan cukup banyak masalah, karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan harus didaftarkan di lembaga yang lain, yaitu Lembaga Catatan Sipil yang bernaung dibawah Departemen yang berbeda. Lembaga Catatan Sipil, tidak mempunyai kewenangan atau kemampuan untuk menguji secara materiil akta perkawinan dari pihak yang akan mendaftarkan pencatatan kelahiran anak/anak-anaknya.⁵⁹

Dalam masyarakat banyak beredar “Buku Nikah” palsu atau asli tetapi Palsu (aspal). kelihatannya sepele tetapi kalau dilihat akibat hukum dari pendaftaran kelahiran anak dari perkawinan yang secara hukum dapat dibatalkan, karena “Buku Nikah” nya palsu, maka tentunya terdapat kemungkinan akan menimbulkan masalah yang cukup besar, baik bagi kepastian hukum, maupun bagi hak anak yang menjadi korban dari perbuatan orang tuanya, karena perkawinan itu tidak pernah ada, maka

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Mansyur Syah, SH, Wakil Panitera Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 9 Februari 2009

keabsahan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak pernah ada, dapat menimbulkan masalah hukum, meskipun hukum menentukan pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan kepentingan anak yang dilahirkan.

Bagi perkawinan yang tidak dilangsungkan secara “sah” tentu tidak terdapat kemungkinan untuk mendaftarkan perkawinannya, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak tidak sah, dan pencatatan kelahirannya adalah sebagai anak tidak sah.

Dengan tidak dicatatkan suatu perkawinan maka telah terjadi pengabaian dalam mendapat identitas akibatnya akan berdampak pada hak-hak anak yang lain yaitu :⁶⁰

1. hak mewaris, ini menyangkut hak anak dalam keluarganya.
2. hak tidak mendapat pelayanan publik, hak yang harus diberikan oleh negara.
3. hak sosial yaitu anak tidak mendapatkan/keberadaannya tidak ada atau tidak pernah dianggap ada.

Hak mendapatkan identitas merupakan hak dasar bagi seorang anak dan bagian dari hak asasi, karena dengan adanya identitas baru anak mendapatkan hak-hak yang lain dengan tidak adanya identitas maka anak rentan akan penelantaran dalam hal tidak dapat biaya sekolah (ekonomi), psikologis terlanggar, rentan eksploitasi.⁶¹

Seharusnya untuk mendapatkan identitas anak negara memberikan keringanan karena anak tidak dibeda-bedakan karena pada dasarnya

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Arist Merdeka Sirait, tanggal 11 Februari 2009

⁶¹ *Ibid*

anak tidak pernah ada cita-cita atau keinginan untuk dilahirkan dan setiap anak berhak mendapat identitas.⁶²

Untuk melindungi anak dalam mendapatkan identitas maka komnas anak mendesak pemerintah untuk mengadakan program akta gratis, disamping itu syarat-syarat untuk mengurus akta kelahiran harusnya lebih diberikan keringanan.⁶³ Dengan adanya akta tersebut maka anak pun diakui keberadaanya dan bisa mendapatkan pelayanan publik dan hak-hak lainnya.

Kasus perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga mengakibatkan hak anak terlanggar dapat dilihat dalam permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bekasi, upaya hukum ini hanya dapat dilakukan bagi pasangan yang menikah secara Islam.

Itsbat Nikah berarti penetapan pengadilan terhadap suatu perkawinan yang pernah dilakukan. Itsbat nikah dapat dilakukan jika perkawinan tersebut telah dilakukan dengan prosedur dan dilakukan pencatatan di KUA, tetapi karena hal-hal diluar jangkauan manusia semua catatan dan alat-alat bukti hilang. Itsbat nikah juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk menguatkan dan menerbitkan alat bukti (Akta Perkawinan) dari perkawinan-perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan hanya dapat dilakukan Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, hal tersebut guna

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

melindungi pihak wanita agar memperoleh status yang jelas.⁶⁴ namun Itsbat Nikah juga dapat dilakukan apabila perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan namun karena sesuatu dan lain hal belum tercatat atau tidak dapat dicatatkan.

Sedangkan untuk Perkawinan bagi pasangan selain Islam apabila perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di kantor sipil maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya bisa diakui dengan cara pengesahan anak sehingga anak tersebut menjadi anak sah.

Pengesahan anak sehingga anak tersebut menjadi anak yang sah hanya dapat dilakukan apabila orang tuanya mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil terlebih dahulu sedangkan sebelum perkawinan dicatatkan maka anak tersebut hanya bisa mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ibu saja atau disebut juga sebagai anak luar kawin.⁶⁵

Menurut Yeyet Nurhayati S.H., Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Adopsi Anak, Ganti Nama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Bekasi agar perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama saja tapi tidak dicatatkan maka syarat-syarat yang harus dipenuhi

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Mansyur Syah, SH, Wakil Panitera Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 9 Februari 2009

⁶⁵ Wawancara dengan Yeyet Nurhayati, SH, Kepala Seksi Kelahiran , Kematian Adopsi Anak Ganti Nama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Bekasi, Pada Hari Kamis, Tanggal 5 Februari 2009.

agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan dan berlaku untuk kedua mempelai adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Akta Kelahiran (asli dan foto copy)
2. Pemandian/Baptis/Sidi/Surat simpatisan dari Gereja/Tanda Warga Katholik (asli dan foto copy)
3. Surat tanda bina Agama Hindu/Budha yang bersangkutan (asli dan foto copy)
4. Surat Keterangan Penduduk (KTP) (asli dan foto copy) yang masih berlaku
5. Surat keterangan belum pernah kawin dari kelurahan (kota Bekasi)/ aslinya
6. Bagi yang umurnya belum genap 21 tahun
 - a. Akta izin kawin dari orang tuanya
 - b. Akta kematian orang tua (jika orang tuanya meninggal dunia)
 - c. Orang tua hadir pada waktu pencatatan perkawinan
7. Bagi yang sudah kawin
 - e. Akta perceraian (jika bercerai)
 - f. Akta kematian suami/istri (jika janda/duda telah meninggal dunia)
8. Kartu keluarga (asli dan foto copy) yang masih berlaku
9. Pemberkatan perkawinan menurut Agamanya (asli dan foto copy)
10. Pas foto 4x6 (berwarna dan berdampingan)
11. Akta kawin orang tua

⁶⁶ *Ibid.*

12. Foto copy KTP saksi 2 (dua) orang

13 Surat keterangan gereja bekasi bagi pemberkatannya diluar kota Bekasi.

Setelah dipenuhi syarat-syarat diatas baru dapat diterbitkan akta nikah kemudian Akta kelahiran pegesahan anak sebagai anak sah, dengan upaya tersebut barulah seorang anak bisa mendapat perlindungan hukum dan kedudukannya menjadi anak sah.⁶⁷

⁶⁷*Ibid*

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak, maka kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, anak tersebut hanya punya hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Disamping itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara penulis, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut jadi akta kelahiran merupakan dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya baik dari orang tuanya sendiri, sehingga pemerintah kesulitan untuk membuat akta kelahiran anaka tersebut.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, untuk memperoleh status menjadi anak sah bagi pasangan yang beragama Islam adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah Kepengadilan Agama Bekasi dengan maksud agar Pengadilan Agama Bekasi

menetapkan pengesahan perkawinan. Sementara itu untuk Perkawinan bagi pasangan selain Islam yang pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil, upaya yang dapat dilakukan apabila perkawinannya hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di kantor sipil, Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tuanya mencatatkan perkawinannya pada kepaniteraan pengadilan negeri.

4.2. Saran

1. Perlunya dibentuk atau diatur pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian dilakukan hanya pada satu instansi, sehingga terdapat kesinambungan mulai dari pencatatan perkawinan, kelahiran dan kematian. Dalam arti pembenahan sistem pencatatan kelahiran harus pula diikuti dengan pembenahan sistem pencatatan perkawinan seperti pelayanan yang baik, meringankan prosedur dan syarat-syarat pendaftaran. Disamping itu juga dari masyarakat itu sendiri yaitu ditumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan karena akan berdampak pada pencatatan kelahiran dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan oleh instansi terkait mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah pencatatan perkawinan ini karena berdampak terhadap pencatatan kelahiran dan pelanggaran terhadap hak anak.

pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur lebih lanjut secara jelas dan tegas mengenai hak-hak anak terutama hak yang paling mendasar yaitu untuk mendapatkan akta kelahiran sehingga semua anak mendapatkan Akta kelahiran dan diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan diberikan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia. Dan perlu diketahui masalah banyaknya anak Indonesia yang tidak punya akta kelahiran bukan hanya masalah biaya namun juga masalah birokrasi dan juga persyaratan utama yaitu tidak adanya akta kelahiran orang tuanya. Harusnya dicarikan solusi untuk itu. Sudah menjadi kewajiban negara dalam memberi perlindungan hukum antara lain memberikan kemudahan bagi pendaftaran perkawinan dan kelahiran, dalam arti di buat petunjuk pelaksanaan yang mudah dimengerti dan tidak menyulitkan dalam pengurusan.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 2001
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Dian Rakyat, Jakarta, 2002
- Djoko Parkoso, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987
- Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, 2005,
- Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998,
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 1975
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju , Bandung, 1990
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam UU*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2000
- Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2000
- Moh Zahid, *Duapuluh lima, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2002
- R. Abdul Djamil, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta, 1996

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985

Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Jakarta, 1991

Victor M Sitomorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Wila Chandrawita Supriadi, *Agama dan Kepercayaan*, Projustitia, Jakarta, 1997.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Di Indonesia
- UU Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

Daftar Pustaka

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 2001
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Dian Rakyat, Jakarta, 2002
- Djoko Parkoso, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987
- Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, 2005,
- Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998,
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 1975
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju , Bandung, 1990
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam UU*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2000
- Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2000
- Moh Zahid, *Duapuluh lima, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2002
- R. Abdul Djamil, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta, 1996

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985

Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Jakarta, 1991

Victor M Sitomorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Wila Chandrawita Supriadi, *Agama dan Kepercayaan*, Projustitia, Jakarta, 1997.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Di Indonesia
- UU Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

